ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BELU TAHUN 2019-2022

Sehubungan dengan adanya reformasi, Pemerintahan Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang – undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2004 dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah baik itu kabupaten maupun Kota, untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik dalam bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran kinerja keuangan daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah karena pada laporan tersebut menyediakan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan

diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah (Assidiqi, 2016).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama periode 2019-2022, dan (2) bagaimana Kinerja Keuangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Belu selama periode 2019-2022

Berdasarkan persoalan penelitian tersebut maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut : kinerja keuangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu periode 2019-2022 menunjukkan kinerja yang baik .

Populasi dalam penelitian ini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2019-2022. Sampel penelitian ini adalah laporan anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Belu Tahun 2019-2022. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah Kabupaten Belu, berdasarkan hasil analisis varians pendapatan daerah tahun anggaran 2019-2022 Kabupaten Belu dapat dikategorikan kurang baik. Berdasarkan hasil analisis Pertumbuhan Pendapatan dapat dilihat pertumbuhan pendapatan di Kabupaten Belu tahun anggaran 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif. Berdasarkan hasil analisis rasio Derajat desentralisasi daerah Kabupaten Belu dari tahun 2019-2022 terus mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan derajat desentralisasi daerah Kabupaten Belu memiliki rata-rata sebesar 8.66% ini berarti derajat desentralisasi dinilai tidak baik. Berdasarkan hasil analisis Efektivitas PAD secara keseluruhan rata-rata dapat

disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belu kurang efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena nilai rasio efektivitas kurang dari 100% sebesar 84.31%.

Hasil analisis kinerja belanja daerah Kabupateen Belu, berdasarkan hasil analisis varians belanja daerah Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu selama tahun 2019-2022 secara umum dapat dikatakan baik. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Pertumbuhan Belanja Daerah menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu mengalami pertumbuhan negatif. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Keserasian Belanja Daerah secara umum terlihat bahwa sebagian besar dana belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi, dan hanya beberapa persen dialokasikan untuk Belanja Modal. Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Belu dilihat dari Efisiensi Belanja Daerah, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belu telah melakukan efisiensi belanja.

Kata kunci : Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah